



Penundaan Lelang, Hambat Pertumbuhan Ekonomi

PONTIANAK - Terlambatnya lelang proyek dari dana APBN dapat menjadi catatan buruk Pemda dan menghambat pertumbuhan ekonomi. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Kantor Dirjen Perbendaharaan Wilayah Kalimantan Barat, Edward Nainggolan. Menurutnya, keterlambatan pengurusan lelang proyek APBN atau APBN membuat banyak proyek menumpuk di akhir tahun. Dampaknya adalah pertumbuhan ekonomi yang tidak merata dalam satu

tahun kalender.

Selain itu, kata dia, proyek fisik yang menumpuk di akhir tahun juga akan membuat kualitas fisik yang dibangun tidak optimal. Biasa terjadi, di akhir tahun musim hujan, sehingga pengerjaan proyek terhambat dan cuaca akan mempengaruhi juga kualitas fisik. "Jadi kami mengimbau kepada satuan kerja dan pemda untuk tidak terlambat melakukan lelang proyek," sebutnya, kemarin.

Tidak hanya itu, menum-

puknya proyek di akhir tahun juga membuat proses pencairan dana APBN semakin banyak kuantitasnya. Dirjen Perbendaharaan sebagai bendahara umum negara baik dari sisi pelayanan kepada stakeholder maupun harus ekstra keras dalam mempersiapkan infrastruktur teknologi dan informasi dalam melayani masalah-masalah yang muncul saat pencairan dana APBN.

"Dalam setiap akhir tahun anggaran sering ditemui hal-

hal yang menjadi kendala dalam pekerjaan kita mencairkan dana APBN. Kita memang berusaha maksimal supaya tugas yang diberikan dapat selesai, baik dari pelayanan yang kita berikan maupun kesiapan IT kita," katanya. Menurutnya, kuantitas pekerjaan yang menumpuk di akhir tahun sering menjadi penyebab muncul hal-hal yang menurunkan kualitas layanan kita dalam menyalurkan dana APBN di seluruh wilayah Indonesia.

Dia juga menyebut, pada

pertengahan Desember tahun lalu, pihaknya sudah melakukan penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan penyerahan Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) di wilayah Kalbar. Total anggaran untuk Kalimantan Barat tahun ini mencapai Rp28,3 triliun. Terdiri dari DIPA sebesar Rp8,8 triliun dan TKDD sebesar Rp19,5 triliun.

Dalam laporannya, Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat juga menyam-

paikan perkembangan penyerapan anggaran pada tahun lalu. Belanja Pegawai terserap 94 persen atau sejumlah Rp3,1 triliun; Belanja Barang terserap 76 persen atau sejumlah Rp3,4 triliun; Belanja Modal terserap 72 persen atau sejumlah Rp2,4 triliun; Belanja Bantuan Sosial terserap 90 persen atau sejumlah Rp11 miliar; DAK Fisik sudah disalurkan sebesar 81 persen atau sejumlah Rp1,9 triliun; dan Dana Desa sudah disalurkan sebesar 96

persen atau sejumlah Rp1,6 triliun.

Sebagai informasi, audit BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2017 meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yaitu: Pemprov Kalimantan Barat, Pemkot Pontianak, Pemkab Kubu Raya, Pemkab Mempawah, Pemkot Singkawang, Pemkab Sanggau, Pemkab Landak, Pemkab Sekadau, Pemkab Ketapang, Pemkab Sintang, dan Pemkab Kapuas Hulu. (ars)